

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan zaman dewasa ini telah membawa gelombang perubahan terhadap seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Secara simultan, potret realitas global telah diwarnai dengan perkembangan teknologi yang dalam pandangan modernis dianggap sebagai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan manusia (Harriguna & Wahyuningsih, 2021). Melalui pesatnya perkembangan teknologi, maka lahirlah era digital yang dalam proses rotasinya menghasilkan implikasi positif dan negatif terhadap masyarakat. Era digital merupakan transisi kehidupan korporeal menuju dunia maya yang ditandai dengan teknologi digital sebagai instrument komunikasi (Danuri, 2019). Corak yang terlihat pada potret digitalisasi tersebut ialah mengenai arus perkembangan informasi yang melesat begitu cepat melintasi daerah, pulau, hingga lintas negara.

Capurro dalam Hardiman (2021) mengistilahkan manusia yang hidup dan berselancar dalam arus dunia digital dengan istilah '*Homo Digitalis*'. Lebih lanjut, Budi Hardiman mengafirmasi jika dewasa ini manusia tidak lagi menyandang statusnya sebagai *homo sapiens* melainkan telah bergeser menjadi *homo digitalis*. Atas fenomena tersebut, manusia yang dulunya lebih banyak menghabiskan waktunya dalam dunia nyata dewasa ini telah beralih kepada dunia maya yang dihiasi dengan beragam konsekuensi atas komunikasi digital yang terjalin secara horizontal antar masyarakat. Menjamurnya ruang-ruang digital dalam segmentasi sosial di Indonesia mendorong terciptanya transformasi budaya digital bagi masyarakat. Pandemi Covid-19 menjadi fenomena

afirmatif yang mendukung terbentuknya budaya digital pada masyarakat Indonesia sehingga ruang digital saat ini secara bertahap telah memengaruhi perilaku masyarakat dalam berkomunikasi dan berinteraksi (Arianto, 2021).

Dampak transformasi budaya tersebut telah menyentuh aspek politik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menyelami arus informasi-informasi politik pada ruang digital. Ruang digital sebagai dunia virtual yang menampung berbagai macam informasi dari seluruh aspek kehidupan, tentu memiliki instrument untuk melancarkan akses informasi dari seluruh individu di berbagai belahan dunia sekalipun. Teknologi digital yang berkembang tentu menghasilkan perangkat digital seperti gadget, televisi, laptop, komputer, radio, dan perangkat digital lainnya yang diperuntukan agar memperluas jejaring guna melahirkan *instrument* seperti internet, media sosial, media massa, *smart* aplikasi, dan jejaring lainnya (Anggi Munika Putri, 2016). Jejaring tersebut menjadi *instrument* penting dalam mendorong transformasi budaya digital yang sarat akan aktivitas digital dengan banjirnya informasi.

Media sosial sebagai salah satu *instrument* penting teknologi digital tentu menjadi tempat bertebarnya informasi dari berbagai fenomena yang terjadi pada tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, aksesibilitas masyarakat dalam membaca informasi tentu sangat mudah dan bahkan hadir secara tidak menentu melalui algoritma media sosial berdasarkan fragmentasi informasi yang diminati penggunanya (Rahmawati, 2018). Aktivitas politik sebagai fenomena politis di masyarakat tidak jarang diolah menjadi redaksi oleh media massa dan pengguna media sosial yang menguraikan agenda politik sehingga menjadi informasi politik yang beredar pada lini massa media sosial. Indrawan menyebut aktivitas tersebut dengan istilah '*Cyberpolitic*', yakni merupakan

suatu fenomena yang menampilkan ruang siber sebagai arena politik, termasuk media sosial sebagai panggung yang menampilkan pentas aktivitas politik (Indrawan, 2019).

Pergulatan politik di era digital semakin menciptakan arah baru terhadap demokrasi di Indonesia. Kedatangan abad media-digital telah membuka ruang bagi terbentuknya satu bentuk khusus demokrasi, yang disebut Yasraf Amir Piliang sebagai ‘demokrasi media’ atau ‘demokrasi digital’ (Piliang, 2017). Demokrasi digital menurut Hacker dan Dijk merupakan sebuah kumpulan usaha untuk melaksanakan demokrasi tanpa dibatasi oleh ruang, waktu, dan kondisi fisik yang lain menggunakan ICT (*Internet Communication Technology*), tanpa menggantikan secara utuh praktik-praktik politik tradisional pada suatu negara (Van Dijk & Hacker, 2018). Demokrasi digital menjadikan media sosial sebagai etalase narasi politik yang dapat diangkat oleh partai politik dalam melakukan manuver politiknya. Media sosial sebagai ruang digital yang menyediakan panggung politik tentu menjadi angin segar bagi partai politik untuk dapat membangun komunikasi politik di ruang publik dengan efektif.

Media sosial sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada publik kini menjadi panggung partai politik untuk menarik atensi masyarakat. Sebagai ruang demokrasi, media sosial memberikan kebebasan bagi partai politik dalam membangun opini pada media sosial. Begitupun masyarakat, juga memiliki kebebasan dalam berekspresi, beropini, serta berkomentar sesuai dengan koridor norma hukum yang berlaku di Indonesia. Potret *Status quo* tersebut menurut Prisgunanto (2018) disebutnya sebagai era demokratisasi informasi yang merupakan kondisi dimana tidak ada lagi penguasaan informasi publik oleh satu pihak dan pembatasan terhadap akses informasi sehingga setiap individu bebas untuk mendapatkan informasi di mana saja, kapan saja,

tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Fenomena tersebut tentu menjadikan media sosial sebagai ruang edukasi politik sekaligus arena pertarungan kepentingan yang dilakukan oleh partai politik dalam membangun diskursus di ruang publik.

Sebagaimana riset yang dilakukan oleh We Are Social bahwa pengguna media sosial aktif di Indonesia telah mencapai jumlah 191 juta penduduk pada Januari 2022. Jumlah tersebut meningkat 12,35% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 170 juta penduduk pada tahun 2021 (DataIndonesia.id, 2022). Fenomena kenaikan jumlah pengguna media sosial tersebut merupakan peluang sekaligus ancaman bagi demokrasi. Menjadi peluang karena media sosial mampu menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi, ruang dialog publik, menambah pengetahuan politik, serta meningkatkan angka partisipasi masyarakat terhadap politik. Dan menjadi ancaman ketika media sosial menjadi ruang untuk melempar kebencian antar identitas karena perbedaan pilihan politik dan menampilkan berita hoax yang memengaruhi persepsi masyarakat. Sebagai komponen penting dalam demokrasi, tentu partai politik memiliki peran penting dalam menentukan nasib demokrasi digital yang dihuni oleh beragam diskursus politik melalui media sosial.

Dalam sistem demokrasi, media menjadi pilar penting untuk mencegah runtuhnya demokrasi. Konsep *trias politica* yang diimplementasikan pada konsep pembagian kekuasaan tentu mengharuskan media sebagai pilar keempat demokrasi untuk menjadi penyangga runtuhnya demokrasi ketika pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif mulai mengalami situasi lemah akibat turbulensi pada *check and balance* di tubuh lembaga kekuasaan (Hariyadi, 2018). Dahlan dalam Hikmat & Nurbaya (2010) menguraikan jika tolak ukur demokrasi dapat diukur melalui adanya wacana publik, pertukaran pendapat,

gagasan, perbedaan secara terbuka, arus informasi yang tidak dibatasi, serta hak dan kebebasan memilih. Partai politik sebagai instrument penting demokrasi tentu memegang kompas demokrasi sehingga memiliki andil besar dalam menentukan arah demokrasi di masa depan, terlebih dalam melahirkan diskursus demokrasi melalui media sosial.

Peran partai politik dalam membangun demokrasi tidak hanya sekadar menjadi motor penggerak pada masa Pemilu. Tidak jarang partai politik tenggelam pada kepentingan partai, kelompok, bahkan pribadi yang justru semakin mendekati senjakala demokrasi di Indonesia karena memusatkan tujuannya hanya pada upaya untuk meraih kekuasaan. Sebagai instrument yang turut memelihara iklim demokrasi yang stabil, maka partai politik mempunyai fungsi dalam keterlibatannya menjaga pilar demokrasi. Miriam Budiardjo (2003) menjelaskan empat fungsi partai politik dalam negara demokrasi, diantaranya ialah, *pertama*, sebagai sarana komunikasi politik, *kedua*, sebagai sarana rekrutmen politik, *ketiga*, sebagai sarana pengatur konflik, dan *keempat*, sebagai sarana sosialisasi politik. Keempat fungsi tersebut tentu harus terlaksana secara proporsional tanpa terfokus hanya pada salah satu fungsi saja.

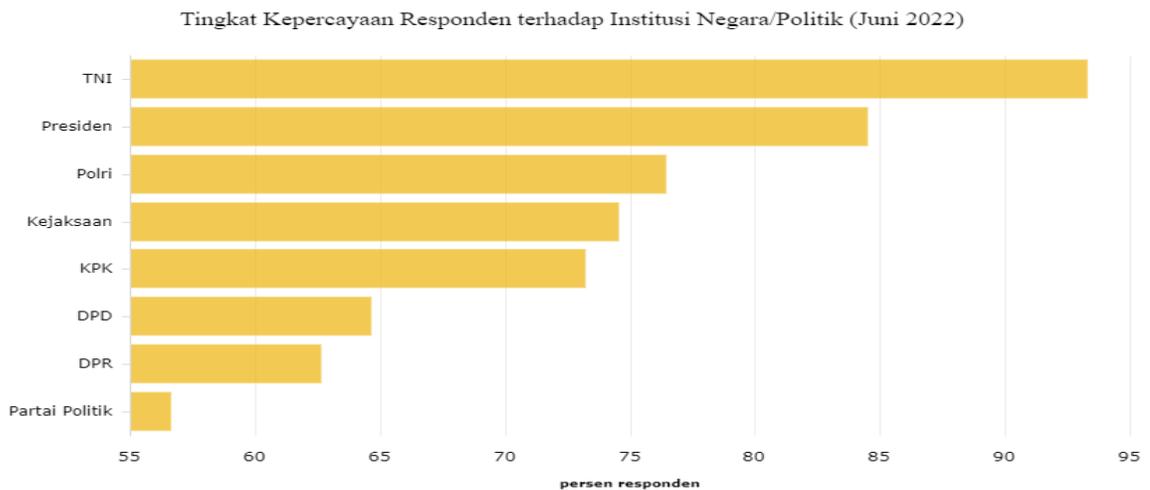
Potret realitas yang terjadi pada lanskap politik di Indonesia memperlihatkan bahwa partai politik masih belum secara optimal menjalankan fungsi dan kedekatan emosional partai kepada publik. Adapun penyebab deoptimalisasi fungsi partai politik tersebut menurut Rosit dan Vania dalam Heryanto, dkk (2021) bahwa terdapat lima problematika pada tubuh partai politik saat ini, di antaranya ialah, *pertama*, partai politik belum menjadi institusi publik yang memiliki tanggung jawab atau akuntabilitas terhadap pemilihnya. *Kedua*, partai politik masih terjebak dalam pusaran personalisasi dan oligarkis partai dalam proses pengambilan keputusan strategis. *Ketiga*, praktik mahar

politik yang menguntungkan pihak tertentu. *Keempat*, politik uang sebagai mobilisasi electoral dari partai politik. Dan *kelima*, perilaku korupsi yang sering terjadi di tubuh partai politik.

Gejala di atas tentu menjadi faktor yang menghambat kinerja partai politik sehingga fungsi partai politik menjadi tidak optimal. Implikasi dari faktor tersebut tentunya berdampak pada kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai institusi yang berperan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat melalui perwakilannya di meja parlemen. Krisis kepercayaan terhadap partai politik tentu menjadi ketakutan partai politik karena menyangkut kepentingan suara pada masa pemilu dan pilkada (Budianto, 2014). Krisis kepercayaan yang melanda partai politik tentu menjadi suatu indikasi bahwa demokrasi saat ini tengah berada dalam kondisi yang tidak sehat.

Sebagaimana survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia yang rilis pada senin (17/7/2022), bahwa partai politik merupakan institusi yang memiliki tingkat kepercayaan paling rendah daripada institusi negara atau politik lainnya. Survei tersebut mencatat bahwa partai politik hanya menerima kepercayaan sejumlah 56,6% responden, yang kemudian disusul oleh DPRD sejumlah 62,6% responden, kepercayaan publik terhadap DPD 64,6% responden, kepercayaan publik kepada KPK 73,2% responden, kepercayaan publik pada Kejaksaan Agung 74,5% responden, kepercayaan publik kepada Polri 76,4% responden, kepercayaan terhadap presiden 84,5% responden, dan kepercayaan publik terhadap instansi negara tertinggi jatuh kepada TNI dengan jumlah 93,3% responden (Databoks, 2022). Tentu survei tersebut mengindikasikan bahwa partai politik mengalami persoalan serius terhadap kepercayaan publik, dan harus melakukan upaya *rebranding* melalui diskursus yang dibangun terhadap masyarakat.

Gambar 1.1 Survei Indikator Politik Indonesia mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara/politik (Juni 2022)



katadata.co.id

databoks

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/13/berapa-banyak-warga-yang-percaya-partai-politik-ini-hasil-surveinya>

Untuk dapat mengupayakan tumbuhnya kepercayaan publik terhadap partai politik salah satu langkahnya ialah melalui pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik. Budianto menjelaskan bahwa bertumbuhnya pemahaman dan pendidikan politik masyarakat membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap politik dan partai politik (Budianto, 2014). Karenanya, di era digital saat ini, pendidikan politik secara mudah dapat dilakukan oleh partai politik melalui media sosial. Kontribusi partai politik dalam membangun demokrasi digital salah satunya melalui produksi diskursus pada media sosial yang berorientasi terhadap pencerdasan masyarakat terkhusus pada peningkatan pemahaman politik. Pelaksanaan pendidikan politik yang dibangun oleh partai politik tentu menjadi strategi yang lebih bermartabat untuk menarik simpati masyarakat, dibandingkan dengan hanya melalui pengumbaran janji dan praktik menyimpang yang cenderung amoral.

Peran partai politik untuk menyelenggarakan pendidikan politik terhadap masyarakat tentunya menjadi kewajiban partai sebagai lembaga politik yang secara konstitusional memiliki fungsi pendidikan politik. Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa disebutkan fungsi partai politik salah satunya adalah untuk “*melakukan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*”. Dengan adanya fungsi edukatif partai politik sebagaimana yang tertuang pada UU No 2 Tahun 2011, maka pelaksanaan pendidikan politik menjadi amanat konstitusional yang harus ditunaikan partai politik baik secara formal maupun informal.

Realitas pelaksanaan pendidikan politik yang dibangun oleh partai politik di Indonesia, cenderung berorientasi terhadap popularitas daripada orientasi terhadap kecerdasan masyarakat dalam dunia politik. Bahkan ideologi yang semestinya menjadi landasan dan nilai dalam perjuangan partai politik yang seharusnya menjadi diskursus yang dibangun, justru hanya menjadi kredo suci yang nihil implementasi. Pemilu yang seharusnya mendasarkan setiap gerak dan diskursusnya sebagai implementasi dari ideologi partai politik kini berubah menjadi pemilu yang mendasarkan diri pada popularitas (Lindawati, 2014). Karenanya, problematika krisis kepercayaan publik terhadap partai politik, haruslah dilakukan upaya *resterilisasi* atas beragam stigma buruk yang disematkan terhadap partai politik, melalui pelaksanaan pendidikan politik untuk menciptakan politik nilai yang lebih bermartabat.

Kontestasi partai politik di Indonesia dalam melaksanakan pendidikan politik dapat ditinjau dari kedua partai politik besar yang memiliki basis ideologi yang berbeda, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berbasiskan ideologi Islam (Basyir, 2014), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berbasiskan ideologi Marhaenisme (Kurniasih & Turtiantoro, 2018). Kedua partai tersebut memiliki rekam jejak politik yang sensasional dalam berkontestasi pada panggung politik nasional, dengan semangat memperjuangkan ideologi agar nilai-nilai tersebut dapat terdistribusikan dan lestari di masyarakat. Spectrum ideologi yang berbeda membuat kedua partai tersebut semakin gentar dalam melakukan sebuah pendidikan politik untuk memperjuangkan kepentingan ideologis melalui upaya peningkatan literasi publik. Karenanya, tidak jarang ditemukan partai politik yang membungkus ideologinya dengan pendidikan politik.

Sebagai kedua partai yang memiliki popularitas tinggi, maka PKS dan PDI-P seharusnya membangun diskursus pada publik yang konstruktif, agar turut mendorong indeks kepercayaan masyarakat terhadap partai politik supaya semakin meningkat dan komunikasi politik dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Pelaksanaan pendidikan politik tentu menjadi opsi yang semestinya dilakukan oleh kedua partai politik tersebut dalam menjalankan fungsi sosialisasi politiknya, terlebih diskursus yang mengandung ideologi sehingga secara prinsip kedua partai tersebut dapat membangun demokrasi yang dialogis melalui wacana yang dibangun. Selaras dengan pernyataan Alan Ware bahwa ideologi menjadi sarana untuk mengagregasi kepentingan umum dan menjadi daya tarik masyarakat dalam memberikan suaranya ketika Pemilu (Ware, 1996).

Pelaksanaan pendidikan politik menjadi agenda penting yang harus diupayakan secara massif oleh kedua partai politik tersebut agar nilai-nilai Islam yang melandasi gerak PKS dan Marhaenisme-Nasionalis yang melandasi gerak PDI-P terkonstruksi dan dirasakan oleh khalayak luas. Di era digital saat ini, media telah menjadi bagian dari partai politik, yakni sebagai alat untuk transformasi ideologi tertentu dari partai politik terhadap publik (Muttaqin, 2011). Tentunya, media sosial sebagai ruang pertarungan ideologi menyediakan arena terhadap partai politik untuk bersaing dalam membangun wacana di ruang digital. Media sosial yang juga sebagai panggung untuk melangsungkan pendidikan politik secara praktis melalui visualisasi. Salah satu media sosial yang menjadi ruang untuk membangun wacana pendidikan politik ialah Twitter.

Pengguna media sosial twitter di Indonesia sebagaimana hasil riset yang dilakukan oleh We Are Social telah mencapai 18,45 juta pengguna pada tahun 2022 yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna twitter terbesar di dunia, menduduki peringkat kelima di dunia (DataIndonesia.id, 2022). Banyaknya jumlah pengguna Twitter tersebut menjadikan media sosial twitter sebagai etalase partai politik untuk menampilkan berita politik dan sebagai sarana dalam menjalankan fungsi pendidikan politik. Pada media sosial twitter, PKS dan PDI-P memasuki peringkat tiga besar partai politik Indonesia dengan jumlah *followers* terbanyak. Peringkat pertama, diduduki oleh Gerindra dengan 680.035 *followers*, kedua PKS dengan jumlah 482.042 *followers*, dan ketiga PDI-P dengan 301.727 *followers* pada 31 Mei 2023.

Pembangunan diskursus pendidikan politik berbasis ideologi pada media sosial twitter oleh PKS dan PDI-P menjadi tinjauan penting untuk mengukur sejauh mana

pelaksanaan pendidikan politik yang telah dilakukan oleh kedua partai politik tersebut untuk dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik. Dengan mengupayakan pelaksanaan pendidikan politik di media sosial, maka strategi untuk mendapatkan atensi masyarakat tentunya lebih bermartabat dan terkesan tidak hiperpolitis, dibandingkan hanya mengumbar janji politik dan menampilkan citra seorang tokoh di media. Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pendidikan Politik Melalui Media Sosial: Analisis Komparatif Pelaksanaan Pendidikan Politik Pada Twitter Dewan Pimpinan Pusat PKS dan PDI-P (Studi Kasus Pada Tahun 2021 – 2022)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini ialah mengenai bagaimana pelaksanaan pendidikan politik PKS dan PDI-P melalui media sosial twitter

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PKS dan PDI-P melalui media sosial twitter.

D. Manfaat Penelitian

Dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini antara lain ialah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik di media sosial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk informasi penelitian lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik mengenai pelaksanaan pendidikan politik melalui media sosial.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi mengenai pendidikan politik terhadap masyarakat, khususnya bagi pengguna media sosial. Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk partai politik sebagai lembaga politik, namun juga seluruh masyarakat yang terkena dampak atas pendidikan politik yang dilakukan secara digital melalui media sosial.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan 29 literatur review dari artikel jurnal dengan masing-masing pembahasan berbeda yang tentunya memiliki keterkaitan dengan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik melalui sosial media. Adapun tujuan dari tinjauan pustaka antara lain ialah untuk mengkaji tentang persamaan dari penelitian yang akan diteliti dan mencari informasi untuk mendapatkan letak perbedaan dari penelitian sebelumnya. Literature pada penelitian ini terbagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu: *pertama*, kajian tentang pendidikan politik melalui sosial media, *kedua*, fungsi partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik dan yang *ketiga*, kajian tentang pendidikan politik dari PKS dan PDI-P.

Literature yang membahas tentang pendidikan politik melalui sosial media terdiri dari lima artikel jurnal yaitu penelitian yang dilakukan oleh Juwandi, Nurwahid, & Lestari (2019), Rivaldy, Fedria, Maisya & Safitri (2021), Fatanti (2014), Bashori (2018), dan Christina, Nindatu & Lubis (2015). Terjadinya revolusi digital pada abad 21 menghadirkan gelombang perubahan yang bersifat multidimensi sehingga segala aktivitas apapun dapat dilakukan secara praktis dalam dunia digital. Politik sebagai aspek penting dalam sebuah negara juga mengalami dampak digitalisasi tersebut, sehingga terciptanya panggung politik yang semakin menjamur di berbagai media sosial. Pendidikan politik yang tidak jarang dilaksanakan dengan metode seminar, sosialisasi, maupun *Focus Group Discussion* (FGD) kini secara mudah dilaksanakan melalui media sosial dengan membangun diskursus dan narasi yang dimuat dalam konten di platform media sosial (Bashori, 2018).

Implementasi dari pelaksanaan pendidikan politik melalui media sosial telah memiliki dampak signifikan dalam pengembangan literasi dan peningkatan partisipasi politik warga negara untuk ikut serta terlibat dalam aktivitas politik, baik dalam pengembangan wawasan politik, penumbuhan kepekaan terhadap fenomena politik, hingga partisipasi dalam kegiatan pemilu (Juwandi et al., 2019). Efektivitas pelaksanaan pendidikan politik melalui sosial media telah menyentuh masyarakat pedesaan hingga pemuda tani di kalangan masyarakat desa (Christina Jis et al., 2015). Salah satu media sosial yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik ialah Twitter. Dalam pelaksanaan pendidikan politik, platform twitter memiliki keunggulan diantaranya yaitu adanya fitur *trending topic* sehingga pengguna dengan mudahnya mengetahui dan mendalami isu politik yang sedang hangat sehingga mampu meningkatkan kepekaan

terhadap situasi publik (Rivaldy et al., 2021). Adapun implikasi pelaksanaan pendidikan politik melalui media sosial twitter dalam *frame* teori strukturasi adaptif yakni menegaskan ide bahwa media sosial twitter dapat memengaruhi hampir seluruh lapisan masyarakat dan mengilhami adanya perubahan dalam tingkah laku (Fatanti, 2014).

Pada literature kedua membahas tentang fungsi partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik yang terdiri dari sembilan artikel jurnal yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hajar (2022), Gusmansyah (2019), Kusuma, Widianti, Suryani (2020), Meifilina (2021), Saputro (2021), Lestari, Qomariyah (2019), Syahran (2019), dan Ariestino, Kusriyah (2017). Adapun hasil temuan atas penelitian terdahulu tersebut ialah Partai politik memiliki peran signifikan dalam menciptakan arus pemikiran masyarakat dalam melihat fenomena politik melalui fungsi pendidikan politik, mulai dari partisipasi, kesadaran, hingga kemandirian dan kematangan nasionalisme warga negara Indonesia (Hajar, 2022; Hermawan, Candra, 2020; Kusuma et al., 2020; Saputro, 2021). Adapun di era digital, Partai politik telah melakukan praktik pendidikan politik melalui berbagai macam platform sosial media (Meifilina, 2021).

Tinjauan mengenai implementasi dari pasal 11 UU No 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik masih belum terimplementasikan secara utuh dan tepat sasaran oleh partai politik, karena minimnya pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik serta inkonsistensi, ketidakmerataan, tidak intens dan tidak berjangka panjang sehingga menyebabkan belum terealisasinya tujuan pendidikan politik sebagaimana yang tercantum pada UU No 11 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. dengan demikian, maka praktik lapangan pendidikan

politik masih belum dapat terlaksana, karena faktor internal maupun eksternal dari partai politik (Ariestino & Kusriyah, 2017; Gusmansyah, 2019; Kessek, 2019).

literatur terakhir menguraikan tentang kajian pendidikan politik dari PKS dan PDI-P yang terdiri dari lima belas artikel jurnal yang terdiri dari penelitian Geraldly (2019), Belladonna (2018), Lumeno, Pati, Tompodung (2022), Rianto, Rohani (2019), Sholeh (2015), Nasiwan (2005), Aji, Riwanto (2018), Tarsidi (2018), Achmad, Tanjung, Nay, Atty (2022), Wibowo, Yusuf (2022), Pratiwi, Rahayu, Triyanto (2020), Mubarak, Firdaus (2020), Wibowo (2021), Rianto, Rohani (2019), dan Yunizar, Rochniatun (2021). Pelaksanaan pendidikan politik yang dibangun oleh kedua partai tersebut tentu memiliki muatan nilai yang berbeda, karena secara ideologis kedua partai tersebut memiliki perbedaan secara ideologi, PKS memiliki latar ideologi Islam dan PDI-P memiliki latar ideologi Marhaenisme (Geraldly, 2019).

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PKS memiliki muatan materi yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam tanpa menegasikan konsep Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. Materi khusus yang termuat dalam proses pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh PKS, tidak lain adalah mengenai politik Islam, politik Rasulullah, dakwah melalui jalur politik, masyarakat madani, dan muatan materi lainnya yang mengandung nilai-nilai Islam (Achmad, 2022; Belladonna, 2018; Rianto & Rohani, 2019; A. P. Wibowo & Darmawan, 2021; Yunizar & Rochmiatun, 2021). Adapun konsep pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PKS ialah melalui model Tarbiyah, yaitu salah satu konsep pendidikan dalam Islam (Nasiwan, 2005; Sholeh, 2015).

Berbeda dengan pelaksanaan pendidikan politik PKS yang memiliki muatan materi mengenai nilai-nilai Islam, PDI-P memiliki muatan nilai-nilai dalam pendidikan politik yang lebih berorientasi kepada nilai-nilai nasionalisme. Adapun muatan materi PDI-P dalam pelaksanaan pendidikan politik ialah mengenai gotong-royong, politik kebangsaan, demokratis, dan kemerdekaan (Lumeno et al., 2022; Mubarak & Firdaus, 2011; I. Pratiwi et al., 2020; Tarsidi, 2016; A. P. Wibowo & Yusuf, 2022). Dalam praktiknya, pelaksanaan pendidikan politik PDI-P dilaksanakan dengan tiga pendekatan yang sering dilakukan, yaitu pendekatan rekrutmen politik, pendekatan transparansi partai politik, dan pendekatan demokratisasi internal partai politik (Aji, 2018).

Tabel 1.1 Ringkasan Literature Review

No	Jenis	Penulis	Temuan
1.	Pendidikan Politik Melalui Sosial Media	Juwandi, Nurwahid, & Lestari (2019), Rivaldy, Fedria, Maisya & Safitri (2021), Fatanti (2014), Bashori (2018), dan Christina, Nindatu & Lubis (2015)	Implementasi dari pelaksanaan pendidikan politik melalui media sosial telah memiliki dampak signifikan dalam pengembangan literasi dan peningkatan partisipasi politik warga negara untuk ikut serta terlibat dalam aktivitas politik, baik dalam pengembangan wawasan politik, penumbuhan kepekaan terhadap fenomena politik, hingga partisipasi dalam kegiatan pemilu.
2.	Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik	Hajar (2022), Gusmansyah (2019), Kusuma, Widianti, Suryani (2020), Meifilina (2021), Saputro (2021), Lestari, Qomariyah (2019), Syahrani (2019), dan Ariestino, Kusriyah (2017)	Partai politik memiliki peran signifikan dalam menciptakan arus pemikiran masyarakat dalam melihat fenomena politik melalui fungsi pendidikan politik, mulai dari partisipasi, kesadaran, hingga kemandirian dan kematangan nasionalisme warga negara Indonesia. Namun, dalam

			implementasinya, Partai politik masih belum melaksanakan pendidikan politik secara konsisten dan berkala.
3.	Pendidikan Politik PKS dan PDI-P	Geraldly (2019), Belladonna (2018), Lumeno, Pati, Tompodung (2022), Rianto, Rohani (2019), Sholeh (2015), Nasiwan (2005), Aji, Riwanto (2018), Tarsidi (2018), Achmad, Tanjung, Nay, Atty (2022), Wibowo, Yusuf (2022), Pratiwi, Rahayu, Triyanto (2020), Mubarak, Firdaus (2020), Wibowo (2021), Rianto, Rohani (2019), dan Yunizar, Rochniatun (2021)	Materi khusus yang termuat dalam proses pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh PKS, tidak lain adalah mengenai politik Islam, politik Rasulullah, dakwah melalui jalur politik, masyarakat madani, dan muatan materi lainnya yang mengandung nilai-nilai Islam. Sedangkan pada PDI-P muatan nilai-nilai dalam pendidikan politik yaitu lebih berorientasi kepada nilai-nilai nasionalisme. Adapun muatan materi PDI-P dalam pelaksanaan pendidikan politik ialah mengenai gotong-royong, politik kebangsaan, demokratis, dan kemerdekaan.

Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan kajian di atas, telah diuraikan oleh beberapa peneliti terdahulu mengenai pendidikan politik di sosial media, fungsi partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik, dan pelaksanaan pendidikan politik dari PKS dan PDI-P. Maka perbedaan dalam penelitian ini, yaitu terletak pada analisis sistematis pada diskursus mengenai pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh kedua partai politik tersebut dalam *platform* twitter dengan menggunakan aplikasi Nvivo 12 plus sebagai sarana analisis dan input data. Dengan demikian, peneliti memfokuskan penelitian ini pada diskursus yang dibangun dalam konten di twitter PKS dan PDI-P yang berkaitan dengan pendidikan politik.

F. Kerangka Teori

Berdasarkan topik penelitian yang diangkat, penelitian ini menggunakan tiga teori yang digunakan sebagai kerangka penelitian, diantaranya yaitu: Pendidikan Politik, Partai Politik, dan Media Sosial.

1. Pendidikan Politik

Pendidikan politik sebagaimana yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik memiliki pengertian yaitu proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu dalam pelaksanaannya, pendidikan politik menjadi suatu proses pembangunan nilai-nilai terhadap masyarakat mengenai politik untuk dapat meningkatkan wawasan politik guna menumbuhkan kecintaan serta ketertarikan terhadap bangsa dan negara melalui partisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan politik secara arif.

Pendidikan politik menurut Eko Handoyo dan Puji Lestari (2017) merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang berkepribadian politik, agar memiliki kesadaran politik dan mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan politik dari masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi tersebut mengarahkan individu untuk membangun sikap kewarganegaraan melalui pendidikan politik sehingga pemahaman politik tersebut dapat membentuk karakter individu dalam rangka mencapai tujuan politik.

Menurut Kartono (2009) pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis dan moral dalam mencapai tujuan politik. Lebih lanjut, Khoiron (1999) menyebut pendidikan politik dengan istilah *political forming* atau *politische bildung*. Disebut '*forming*' karena terkandung intensi membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan disebut '*bildung*' (pembentukan atau pendidikan diri sendiri) karena istilah tersebut mengandung pengertian pembentukan diri sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik.

Adapun Ruslan (2000) memaknai pendidikan politik sebagai upaya pencerdasan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, baik secara formal maupun informal, dengan usaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalur dengan kultur politik masyarakat yang bergerak pada lembaga-lembaga tersebut di tiap warga negara, sehingga membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, agar warga negara menjadi sadar dan mampu memperoleh sendiri kesadarannya. Kemudian membentuk dan menumbuhkan partisipasi politik secara aktif, dalam memecahkan permasalahan umum masyarakat dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju lebih baik.

Dudih Sutrisman mendefinisikan Pendidikan politik sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang atau lebih, dilakukan secara sadar dalam proses penyampaian budaya politik bangsa dengan memperhatikan nilai Pancasila (Sutrisman, 2019). Adapun pendefinisian tersebut menjadikan nilai Pancasila

sebagai pedoman utama dalam praktik pendidikan politik yang dilaksanakan oleh setiap element penyelenggara sehingga pendidikan politik menegaskan segala kepentingan internal kelompok politik untuk mengakomodir massa dalam mencapai tujuan kekuasaan. Dengan demikian, pancasila menjadi nilai utama yang harus dimuat dalam membentuk budaya politik melalui pelaksanaan pendidikan politik.

Berbeda dengan Sutrisman, Ramlan Surbakti mengorientasikan pendidikan politik pada pembentukan pribadi yang demokratis dan bertanggung jawab. Ramlan Surbakti memahami pendidikan politik sebagai suatu aktivitas yang terorganisir dan efektif yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politik. Lewat pendidikan politik orang berusaha melakukan pembentukan pribadi yang demokratis (*demokratische persoonsvorming*), disamping usaha demokratisasi struktur kemasyarakatannya (Ramlan, 2005). Lebih lanjut, Surbakti membagi sosialisasi politik menjadi dua macam, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

Merujuk definisi pendidikan politik menurut Surbakti yang mengintegalkan pendidikan politik dalam sosialisasi politik, maka Michael Rush dan Phillip Althoff memberikan uraian yang senada dengan makna pendidikan politik dan sosialisasi politik. Rush dan Althoff menjelaskan bahwa sosialisasi politik merupakan proses pengaruh individu untuk bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta

reaksinya-reaksinya terhadap gejala politik (Althoff & Rush, 2005). Dengan demikian, maka definisi sosialisasi politik yang diuraikan oleh Althoff dan Rush lebih merujuk pada aspek psikis pada subjek individu dalam memahami politik.

2. Partai Politik

Partai politik menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik merupakan suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk membela dan memperjuangkan kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara ketahanan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Definisi partai politik sebagaimana yang terumuskan dalam Undang-Undang tersebut menjadikan partai politik memiliki peran penting dalam mengakomodir kepentingan masyarakat dalam sebuah negara sehingga adanya partai politik harus menjadi lembaga yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dalam koridor Pancasila dan UUD 1945.

Secara umum partai politik dapat didefinisikan sebagai sekumpulan dari beberapa manusia yang terkumpul dalam suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan di suatu negara serta menguasai system pemerintahan melalui ideologi tertentu agar mendapatkan kesempatan pada pemilihan umum sehingga mampu mewujudkan cita-cita politik negara secara konstitusional dalam melaksanakan kebijakan dengan dukungan masyarakat (Muhadam & Teguh, 2015). Sejalan dengan definisi tersebut, Miriam Budiardjo mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok orang yang terorganisir serta memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok tersebut

ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional dalam rangka melaksanakan programnya (Budiardjo, 2003).

Secara konseptual, Al-Hamdi (2020) mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terikat atas keyakinan, kepentingan dan komitmen yang sama untuk mencapai tujuan mereka. Adapun pengertian partai politik menurut Carl J. Friedrich dalam Muhadam & Teguh (2015) ialah sekumpulan manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materi.

Dalam dinamika pergulatan partai politik di Indonesia yang sarat akan kepentingan ideologis, cita-cita, dan keinginan dari tiap individu, maka fenomena tersebut mendorong para ilmuwan untuk mengelompokkan partai politik menjadi beberapa klasifikasi, diantaranya ialah klasifikasi secara ideologis. Menurut Al-Hamdi (2020) terdapat tiga klasifikasi partai politik secara ideologis di Indonesia, yaitu nasionalis-sekuler, nasionalis-Islamis, dan nasionalis-Muslim. Adapun dari ketiga klasifikasi tersebut dikelompokkan sebagai kekuatan nasionalis karena secara jelas asas Pancasila dipilih sebagai asas partai dalam seluruh madzhab pada partai politik di Indonesia. Atas klasifikasi berdasarkan ideologi, maka partai politik berperan untuk mengaktifkan serta memobilisasi masyarakat dalam mencapai cita-cita ideologis.

Selain klasifikasi secara ideologis, juga terdapat klasifikasi berdasarkan kekuatan organisasi yang berangkat dari kondisi partai politik di Indonesia pasca 1998, terlebih pada hasil pemilu 2019. Adapun klasifikasi berdasarkan kekuatan organisasi terbagi menjadi tiga kategori, diantaranya ialah partai besar (*major parties*), partai menengah (*medium parties*), dan partai kecil (*small parties*). Adapun dalam klasifikasi tersebut, hasil pemilu menjadi penilaian utama karena melalui pemilu dapat dilihat bagaimana penilaian dan evaluasi masyarakat terhadap kinerja partai politik selama lima tahun sebelumnya (Al-Hamdi, 2020).

Selain klasifikasi berdasarkan ideologi dan kekuatan organisasi, Safa'at Ali (Safa'at, 2011) mengklasifikasikan partai politik berdasarkan tiga tipologi, antara lain: 1) Berdasarkan asas dan orientasinya, 2) Berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya, dan 3) Berdasarkan kemungkinan untuk memenangkan pemilu.

A. Asas dan Orientasi

Tipologi partai politik berdasarkan asas dan orientasinya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Partai Politik pragmatis
- 2) Partai politik kepentingan
- 3) Partai politik doktrin

B. Komposisi dan Fungsi Anggotanya

Adapun tipologi partai politik berdasarkan komposisi dan anggotanya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Partai kader
- 2) Partai *catch-all*
- 3) Partai massa/lindungan

C. Kemungkinan Kemenangan Pemilu

Tipologi partai politik berdasarkan kemungkinan kemenangan pemilu dibagi menjadi dua bagian, antara lain:

- 1) Partai mayoritas
- 2) Partai minoritas

Berdasarkan beberapa tipologi yang telah diuraikan di atas, maka partai politik memiliki berbagai macam variasi, baik yang dilatarbelakangi oleh ideologi, kekuatan organisasi, asas dan orientasi, hingga kemungkinan kemenangan pemilu. Kendatipun partai politik memiliki latar belakang berbeda, namun asas pancasila menjadi landasan pada setiap partai dalam mengaktualisasikan arah dan tujuan partai politik.

Mirian Budiardjo (2003) menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi, partai politik mempunyai empat fungsi dalam menjalankan perannya pada suatu negara, antara lain ialah:

- 1) Sebagai Sarana Komunikasi Politik

- 2) Sebagai Sarana Rekrutmen Politik
- 3) Sebagai Sarana Sosialisasi Politik
- 4) Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Dalam uraian di atas, tentu fungsi Partai politik di negara demokrasi seperti Indonesia menjadi teramat penting dalam menjaga nyawa demokrasi agar tetap hidup di tengah berbagai masalah yang bersifat multi-dimensi di Indonesia. Secara empiris, tentu permasalahan demokrasi tidak lepas dari minimnya kesadaran akan partisipasi masyarakat dalam membangun demokrasi. Sehingga dengan demikian, partai politik memiliki peran besar dalam menjalankan fungsi sosialisasi politik dalam rangka membangun kesadaran masyarakat terhadap politik.

Secara konstitusional, partai politik memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat. Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang partai politik bahwa Partai politik berfungsi “*sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*”. Dengan demikian, maka partai politik sebagai lembaga yang secara konstitusional memiliki fungsi dalam pendidikan politik, memiliki peran signifikan dalam membangun iklim demokratis yang bermartabat dengan pendidikan politik pada masyarakat.

3. Media Sosial

Konsekuensi mutlak dalam pesatnya arus digitalisasi ialah hadirnya masyarakat digital yang lekat dengan sosial media dalam menjalankan aktivitas keseharian. Cappuro menyebut masyarakat digital sebagai '*homo digitalis*' (F Budi Hardiman, 2021). Sebagai sarana telekomunikasi yang menyerap ragam dimensi kehidupan manusia modern ke dalam ruang virtual, maka sosial media membawa manusia menuju dunia maya yang dipadati dengan informasi, dari informasi yang valid hingga *absurd*. Dengan demikian, maka sosial media hadir dalam aktivitas keseharian manusia dengan memiliki beragam implikasi terhadap penggunaannya, baik implikasi positif maupun negatif.

Menurut Van Dijk & Hacker (2018) sosial media merupakan *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna dengan memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun menjalin berkolaborasi. Karenanya, media sosial digunakan sebagai medium dalam menyatukan antarpengguna dan kelompok sosial. Adapun menurut Utari (2011) media sosial merupakan sebuah media *online* dimana penggunaannya dapat dengan mudah untuk berpartisipasi. Berpartisipasi dalam arti seseorang akan dengan mudah berbagi informasi, menciptakan konten, atau isi yang ingin disampaikan kepada orang lain, memberi komentar terhadap masukan yang diterima dan seterusnya. Semua dapat dilakukan dengan cepat dan terbatas.

Adapun media sosial menurut Nasrullah (2015) ialah suatu medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dengan

membentuk ikatan sosial secara virtual. Lebih lanjut, Nasrullah membagi makna bersosial tersebut dalam tiga bentuk, diantaranya pengenalan (*cognition*), komunikasi (*communicate*), dan kerja sama (*cooperation*). Dengan demikian, maka media sosial mempunyai ruang eksplorasi yang lebih luas untuk saling mengenal, berkomunikasi, dan bekerjasama tanpa terbatas dengan bentangan jarak yang memisahkan fisik.

Kaplan dan Haenlein dalam Cahyono (2016) membagi media sosial berdasarkan enam jenis, antara lain:

A. Proyek Kolaborasi

Dalam jejaring dunia maya, website mengizinkan untuk dapat mengubah, menambah, merevisi atau memindahkan ulang berbagai macam konten yang ada di website tersebut. Adapun contohnya dapat ditinjau dari *Wikipedia*.

B. *Blog* dan *Micro Blog*

Dalam media sosial yang tergolong jenis blog atau micro blog ingin membebaskan pengguna untuk mengekspresikan sesuatu, baik curhat, kritik kebijakan pemerintah, maupun beropini. Contoh tersebut dapat ditinjau dari *Twitter*.

C. Konten

Dalam klasifikasi ini aktivitas yang terjalin antarpengguna yaitu saling berbagi konten, baik berupa gambar, reels, video, dan konten lainnya. Contoh tersebut dapat ditinjau dari *youtube*.

D. Situs Jejaring Sosial

Jenis klasifikasi yang menjadi medium paling populer dan memiliki pengguna yang cukup signifikan ialah jejaring sosial atau *social networking*. Dalam jejaring sosial, pengguna terkoneksi dengan individu lainnya baik secara antar personal maupun untuk publik. Adapun contoh dari jejaring sosial ialah *facebook* dan *Instagram*.

E. Virtual Game World

Fantasi berselancar pada dunia virtual tentu memberikan ruang hiburan yang dapat mereplikasikan dunia pengguna melalui visualisasi 3D yang membuat pengguna tersebut memenuhi hasratnya dengan mencari hiburan dalam dunia virtual. Adapun contohnya ialah game online.

F. Virtual social world

Tidak jauh dengan *virtual game world*, dalam *virtual social world* pengguna diajak untuk menyelami dunia simulatif yang memberikan ruang gerak leluasa sehingga hal tersebut mengakibatkan hiperrealitas dengan menciptakan dunia virtual baru yang disebut sebagai *metaverse*. Contohnya ialah *virtual reality*.

Berdasarkan klasifikasi dari Kaplan dan Haenlein menjadikan media sosial sebagai medium yang memiliki fungsi yang luas dengan kecanggihannya dalam jagat dunia maya. Dengan demikian, era digital telah melintasi ruang telekomunikasi melalui media sosial sebagai salah satu instrument digital yang multifungsi dalam melampaui ruang dan waktu.

Dampak sosial media bagi masyarakat menurut Rafiq memiliki pengaruh signifikan dalam perubahan pola dalam kehidupan masyarakat. Sosial media telah memengaruhi perubahan dalam hubungan sosial (*social relationship*) atau perubahan dalam keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial dan segala bentuk perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, sehingga mempengaruhi system sosial, termasuk nilai-nilai, sikap dan pola perilaku antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat (Rafiq, 2020).

Adapun perubahan sosial menurut Rafiq (2020) yang positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, kemudian memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi bagi beberapa penggunanya. Sedangkan perubahan sosial yang negatif seperti munculnya kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma yang ada. Tentu pengaruh tersebut akan menjadikan suatu transformasi budaya dalam pola kehidupan sosial di masyarakat.

G. Definisi Konseptual

Dalam penelitian, konsep merupakan suatu istilah untuk menggambarkan suatu keadaan yang akan diteliti serta di dalamnya meliputi keadaan individu maupun

kelompok yang menjadi objek dalam penelitian. Adapun konsep pada penelitian ini antara lain ialah sebagai berikut:

1. Pendidikan Politik merupakan upaya peningkatan wawasan mengenai politik dan pembentukan karakter yang bertanggung jawab dan bermoral dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik sehingga terciptanya budaya politik yang konstruktif baik secara kognitif, emosional, dan konoatif di masyarakat.
2. Partai Politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisir dan memiliki cita-cita dan pandangan yang sama untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan melalui kontestasi yang diatur secara kontitusional guna merealisasikan program dan tujuannya.
3. Media Sosial merupakan sebuah medium di internet yang membebaskan penggunaanya untuk dapat berbagi informasi, menciptakan kreasi konten, saling berkomunikasi, dan berinteraksi secara virtual tanpa adanya batasan terhadap ruang dan waktu dalam penggunaannya.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional sangat penting dalam menentukan indikator untuk menyelesaikan penelitian ini. Dengan adanya definisi operasional peneliti dapat menggunakan fokus yang ada dalam melihat permasalahan tersebut. Hal ini tentu mempermudah peneliti dalam melakukan identifikasi masalah serta penyelesaiannya. Berikut definisi operasional yang digunakan peneliti dalam penelitian ini:

Tabel 1.2 Indikator Pendidikan Politik di Sosial Media

Variabel penelitian	Indikator	Alat Ukur
Pendidikan Politik di Sosial Media	Mengandung muatan materi politik yang edukatif	Apakah pelaksanaan pendidikan politik PKS dan PDI-P telah mengandung muatan materi politik seperti Identitas Nasional, Demokrasi, Hukum dan HAM, Politik dan Pemerintahan, dan Isu Kontemporer?
	Bahasa yang mudah dipahami	Apakah dalam pelaksanaan pendidikan politik PKS dan PDI-P telah menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh publik?
	Mengandung pesan positif	Apakah dalam pelaksanaan pendidikan politik PKS dan PDI-P mengandung pesan positif yang membangun dan memotivasi publik untuk sadar akan partisipasi politik?

Sumber: Diolah oleh peneliti

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Menurut Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi (2020) bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu upaya ilmiah untuk tujuan yang substantif dengan maksud menyelesaikan suatu permasalahan tertentu yang dilakukan secara mendalam, sistematis dan tanpa menghiraukan kaidah atau aturan berlaku. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *discourse analysis* karena sangat relevan dengan topik

penelitian yang menganalisa teks dan konteks terhadap wacana yang dibangun di sosial media. Secara definitif, pendekatan *discourse analysis* merupakan metode penelitian kualitatif yang berfungsi untuk menganalisis bahasa, tulisan, pidato, percakapan, baik percakapan verbal maupun non-verbal yang digunakan untuk memengaruhi opini publik (Schiffrin, 2007). Dengan demikian, wacana yang akan dianalisis dalam penelitian ini ialah konten pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PKS dan PDI-P melalui aplikasi twitter.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari perolehan data yang didapatkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data antara lain:

a) Data Primer

Data primer merupakan data utama yang peneliti peroleh langsung dari sumber terkait melalui pengamatan terhadap akun twitter Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dan PKS, yaitu @PKSejahtera dan @PDI_Perjuangan. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data twitter PKS dan PDI-Perjuangan pada tahun 2021-2022.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Adapun data tersebut diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet, berita, dan sumber lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik melalui media sosial maupun pola pelaksanaan pendidikan politik oleh PKS dan PDI-P.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan suatu teknik untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti sebagai bahan penelitian. Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, diantaranya ialah:

a) Observasi Teks

Observasi atau pengamatan langsung ditujukan kepada teks yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2010) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya. Dengan demikian, kegiatan observasi ini dilakukan dengan mencari dan menghimpun konten pendidikan politik pada twitter PKS dan PDI-P.

b) Studi Dokumentasi

Dalam studi dokumentasi, peneliti mengumpulkan data mengenai topik yang diteliti misalkan dengan foto, video, buku, jurnal, dan internet untuk dianalisa. Peneliti menerapkan studi dokumentasi dengan mengumpulkan data yang bersumber dari dokumentasi melalui media sosial, yang merupakan media sosial resmi lembaga yang bersangkutan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis dengan mengelompokkan data dalam beberapa kategori dan memaparkannya terhadap unit yang diteliti sehingga hasil temuan dapat dengan mudah diinformasikan terhadap publik. Adapun proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan Nvivo 12 plus pada fitur *Word frequency query*, *chart node coding*, *hierarchy chart of node coded*,

dan *text search query*. Nvivo 12 plus merupakan *software* kualitatif yang membantu peneliti dalam menganalisis data, baik berupa teks, gambar, suara, dan menampilkannya pada hasil yang terstruktur. Adapun proses analisis data menggunakan model *qualitative data analysis* (QDA) atau yang juga dikenal sebagai *five steps analysis* (Woolf & Silver, 2018).

Tabel 1.3 Tahapan Analisis Sosial Media Melalui *Qualiftative Data Analytic* (QDA)

<i>Tow Level of Strategy</i>		<i>Tow Level of Tactics</i>		
<i>Level 1</i>	<i>Level 2</i>	<i>Level 3</i>	<i>Level 4</i>	<i>Level 5</i>
<i>Objectives</i>	<i>Analytic plan</i>	<i>Tanslation</i>	<i>Select tools</i>	<i>Constucted tools</i>
@PKSejahtera @PDI_Perjuangan	<i>NCapture twitter account</i>	<i>Input data into Nvivo 12 Plus</i>	<i>Word Frequency, text search, and visualization</i>	<i>Compare and combination</i>

Sumber: Woolf & Silver (2018)

Tahapan di atas merupakan langkah yang menggambarkan mengenai Nvivo 12 plus mengoperasikan data dengan manajemen dan *meaning* data. Adapun uraian dari tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama yaitu menentukan akun media sosial twitter yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini ialah pada akun twitter @PKSejahtera dan @PDI_Perjuangan
- b. Tahap kedua yaitu *analytic plan*. *Analytic plan* merupakan tahap mencapture data dalam metode Nvivo 12 plus sebagai tahapan dalam mengambil data dari media.
- c. Tahap ketiga yaitu *translation*, sebagai tahap dalam menginput data dalam Nvivo 12 plus kemudian data yang diinput disesuaikan dengan file dan folder yang telah ditentukan.
- d. Tahap keempat yaitu memilih fitur analisis, dimana fitur analisis berfungsi untuk menerjemahkan data yang telah diinput. Adapun fitur yang digunakan dalam penelitian ini ialah *word cloud*, *text searching*, dan *visualization*.
- e. Tahap kelima yaitu *constructed tools* yang merupakan tahap untuk membangun kerangka analisis dengan membandingkan setiap hasil analisis dari setiap *tools* dengan teori yang digunakan.

J. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan kemudahan dalam pembahasan, maka peneliti membuat sistematika penulisan yang terencana yaitu:

Bab I, Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Konseptual, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Gambaran Objek Penelitian. Dalam bab ini akan diulas mengenai profil PKS dan PDI-P

Bab III, Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian mengenai analisis komparatif pelaksanaan pendidikan politik pada PKS dan PDI-P melalui twitter

Bab IV, Penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran